



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
KELAS IA**

**NOMOR : 03 /KPN.W14-U31/OT.00/I/2026
TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA
PENGADILAN NEGERI /HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA**

KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A Tahun 2025, maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA;
- c. Sehubungan dengan adanya Mutasi Dan Promosi Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik maka perlu disusun kembali Struktur Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung RI;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA TENTANG PENUNJUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN NEGERI /HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA**

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A Nomor : **68/KPN.W14-U31/OT.00/II/2025** tanggal 11 Februari 2025 dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEDUA : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah :

1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud.
3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A.

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) meliputi :

1. Manajemen Perubahan.
 - a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota Satuan Kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK / WBBM;
 - b. Merubah pola pikir dan budaya kerja pada setiap unit yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK / WBBM;
 - c. Menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
2. Penataan Tatalaksana.
 - a. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen Kementerian Hukum dan HAM di Zona Integritas WBK / WBBM;
 - b. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas proses manajemen Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A di Zona Integritas menuju WBK / WBBM;

- c. Meningkatkan Kinerja di Zona Integritas menuju WBK / WBBM;
- 3. Penataan Sistem Manajemen SDM.
 - a. Meningkatnya Ketaatan terhadap Pengelolaan SDM Aparatur di lingkungan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A;
 - b. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan SDM Aparatur di lingkungan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A;
 - c. Meningkatnya Disiplin SDM Aparatur di lingkungan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Kelas I.A pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK / WBBM;
 - d. Meningkatnya Efektivitas manajemen SDM Aparatur di lingkungan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A pada Zona Integritas menuju WBK/ WBBM;
 - e. Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur di lingkungan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A pada Zona Integritas menuju WBK / WBBM;
- 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
 - a. Meningkatnya Kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik kelas I.A;
 - b. Meningkatnya Akuntabilitas Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A;
- 5. Penguatan Pengawasan.
 - a. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Pengelolaan Keuangan Negara;
 - b. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Keuangan Negara;
 - c. Mempertahankan Predikat WTP dari BPK atas opini laporan Keuangan;
 - d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang;
- 6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
 - a. Meningkatnya Kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di lingkungan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A;
 - b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh Standarisasi pelayanan Internasional di lingkungan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A;
 - c. Meningkatnya Indeks Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Gresik

Pada Tanggal : 08 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Gresik



Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial
Gresik Kelas I.A

Nomor : 03 /KPN.W14-U31/OT.00/I/2026
Tanggal : 08 Januari 2026

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS I.A

No.	Kedudukan dalam Tim Pembangunan Zona Integritas	Nama
1	Pembina	Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA (Achmad Rifai. S.H., M.H.)
2	Ketua Pembangunan Zona Integritas	Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA (Heriyanti, S.H.,M.Hum.)
3	Koordinator Teknikal	Syawal Aswad Siregar, S.H., M.Hum. (Panitera)
4	Koordinator Operasional	Danny Berlian Sulhan, S.Kom.,S.H. (Plt. Sekretaris)
I. AREA MANAJEMEN PERUBAHAN		
1	Ketua	Etri Widayati, S.H., M.H. (Hakim)
2	Sekretaris	Sri Hariyani,S.H.,M.H. (Hakim)
3	Anggota	I. Akbarur Raihan S.H.,M.H. (Panitera Muda Perdata)
		II. Rayhan Afief Arfarizky, S.H. (CPNS- Analis Perkara Peradilan)
		III. Muhammad Hanzhalah Gasielul Malaikah,S.H. (Analis Perkara Peradilan)
		IV. Mazhrur Rahman Kusuma Wardani, A.Md (Pengelola Sistem Dan Jaringan)
		V. Meyti Agnesta Sembiring, A.Md. (Pengelola Perkara)
		VI. Sarifuddin (PPPK)
		VII. Nurul Aisyiyah (PPPK)
		VIII. Hanifatul Hidayah (PPPK)
II. AREA PENATAAN TATALAKSANA		
1	Ketua	Ersin,S.H.,M.H. (Hakim)
2	Sekretaris	Zulvikar Nur Barlian, S.H. (Panitera Muda Hukum)
3	Anggota	I. Fifiyanti, S.H., M.H. (Hakim)
		II. Muhlis, S.H., M.H. (Panitera Muda PHI)
		III. Herry Mulyantoro, S.E., S.H. (Panitera Pengganti)
		IV. Siswanto,S.H. (Panitera Pengganti)
		V. Bima Wahyu Asya, S.H.. (CPNS-Analisis Perkara Peradilan)

		VI. Anastasia Manik, S.T. (Operator - Penata Layanan Operasional)
		VII. Rafika Lorena, S.E. (Operator - Penata Layanan Operasional)
		VIII. Sheilla Aurell Zhafirah, S.H. (Analisis Perkara Peradilan)
		IX. Riris Dwi Sulistianingsih, S.M. (Outsourcing)
III. AREA PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)		
1	Ketua	Iwan Harry Winarto, S.H., M.H. (Hakim)
2	Sekretaris	Dyah Sutji Imani, S.H.
3	Anggota	I. Dwi Novita Rahayu, S.H., M.H. (Panitera Pengganti)
		II. Danny Berlian Sulhan, S.Kom., S.H. (Kasub Bag Kepegawaian)
		III. Kukuh Yuda Ari Sanjaya, S.H. (Jurusita)
		IV. Kuswandi, S.H. (Jurusita)
		V. Nurroso (Jurusita)
		VI. Sutikno, S.H. (Panitera Pengganti)
		VII. Syinthia Rosa Naibaho, A.Md. (Pengelola Perkara)
		VIII. Liana, A.Md (PPPK)
		IX. Runnah Nur Iffah, S.Pd (Outsourcing)
		X. Hikma Adlan Jabbar, S.Kom (Outsourcing)
IV. AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS KERJA		
1	Ketua	Donald Everly Malubaya, S.H., M.H. (Hakim)
2	Sekretaris	Adelia Febrianti, S.Sos (Kasub Bag PTIP)
3	Anggota	I. Abdi Munawar Daeng M., S.Sos, S.H., M.H (Hakim Ad Hoc)
		II. Setia Permana, S.T., S.H., M.H. (Hakim Ad Hoc)
		III. Lazuardhi Zein Endrinata, S.E., S.H. (Kasub Bag Umum dan Keuangan)
		IV. Satryo Wicaksono, S.T. (Pranata Komputer)
		V. Fenik Andriyas Mega Safutri, S.H. (Bendahara)
		VI. Friska Rosalina, A.Md (Klerik- Pengolah Data dan Informasi)
		VII. Kurniawan, S.H. (PPPK)
		VIII. Priyo Utomo, S.H. (Outsourcing)

V. AREA PENGUATAN PENGAWASAN		
1	Ketua	M. Aunur Rofiq, S.H.,M.H. (Hakim)
2	Sekretaris	A.A. Ayu Christin Agustini, S.H., M.H. (Hakim)
		I. Indah Wardah, S.H. (Panitera Pengganti)
		II. Diyah Ayu Rosita Dewi, S.H. (Analis Perkara Peradilan)
		III. Joko Purnomo, S.H. (Panitera Pengganti)
		IV. Aunur Romadlon (PPPK)
		V. Wulantika Puspawardani Fidyastuty, S.Ei (Outsourcing)
		VI. Achmad Zainuddin (Outsourcing)
VI. AREA PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1	Ketua	Byrna Mirasari,S.H.,M.H. (Hakim)
2	Sekretaris	Anita Puji Lestari, A.Md (Jurusita Pengganti)
3	Anggota	I. Wendy Agus Budiawan, S.H., M.H. (Hakim Ad Hoc)
		II. Nurwono, S.H., M.H. (Panitera Muda Pidana)
		III. Irma Indrawati, S.H. (Analis Perkara Peradilan)
		IV. Dinar Batang Taris, S.H. (Outsourcing)
		V. Mahirul Ulumuddin (Outsourcing)
		VI. Mas Ayu Andriani, S.M. (Outsourcing)
		VII. Syamsul Arifin (Outsourcing)

Ditetapkan : Gresik
Pada Tanggal : 08 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Gresik


ACHMAD RIFAI

Lampiran Keputusan Ketua Pengadlian Negeri / Hubungan Industrial
Gresik Kelas I.A

Nomor : 03 /KPN.W14-U31/OT.001/2026

Tanggal : 08 Januari 2026

STRUKTUR ORGANISASI TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WBK / WBBM PADA PENGADILAN NEGERI /HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS I.A

